

Analisis Sistem Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kantor Walikota Padang

Deyanda Indrian Fhaira¹, Wahyu Alpia Sari², Zikra Fadhilah³, Vicky Brama Kumbara⁴

¹²³⁴Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

*Penulis Korespondensi: Indrianifd@gmail.com¹, wahyualpiasari@gmail.com², zikrafadhilah24@gmail.com³, vickybrama@upiypk.ac.id⁴

Abstract. Internships are a crucial means of integrating theoretical knowledge from lectures with real-world practice. This article aims to analyze the development administration and planning system implemented at the Padang Mayor's Office, specifically in the Development Administration and Planning Section of the Regional Secretariat. The method used was descriptive qualitative research based on participatory field experience from February 9 to March 6, 2026. Data was collected through direct observation, operational involvement in report preparation, data recapitulation, and digitization of office documents. The analysis shows that the development administration mechanism at the Padang Mayor's Office is structured and systematic, and complies with regional regulations, including Padang Mayoral Regulation No. 67 of 2022. Communication and coordination between employees are effective in supporting the accountability of regional development programs. Operational challenges encountered include adapting to a new work culture and understanding complex bureaucratic processes. These challenges were successfully mitigated through an active learning approach, intensive guidance from office technical staff, and ongoing self-evaluation.

Keywords: Development Administration, Planning, Operational Performance, Regional Government, Internship

Abstrak. Magang merupakan sarana krusial untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem administrasi pembangunan dan perencanaan yang diterapkan di Kantor Walikota Padang, khususnya pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis pengalaman lapangan partisipatif selama periode 9 Februari hingga 6 Maret 2026. Data dihimpun melalui observasi langsung, keterlibatan operasional dalam penyusunan laporan, rekapitulasi data, serta digitalisasi dokumen perkantoran. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme administrasi pembangunan di Kantor Walikota Padang telah berjalan dengan terstruktur, sistematis, dan sesuai regulasi daerah Perwako Padang No. 67 Tahun 2022. Komunikasi dan koordinasi antarpegawai berjalan efektif dalam mendukung akuntabilitas program pembangunan daerah. Kendala operasional yang dihadapi meliputi proses adaptasi budaya kerja baru serta pemahaman terhadap alur birokrasi yang kompleks. Kendala tersebut berhasil dimitigasi melalui pendekatan belajar aktif, bimbingan intensif dari staf teknis perkantoran, serta evaluasi mandiri yang berkelanjutan.

Kata kunci: Administrasi Pembangunan, Perencanaan, Kinerja Operasional, Pemerintahan Daerah, Magang

1. LATAR BELAKANG

Proses pembelajaran di jenjang perguruan tinggi dituntut tidak hanya melahirkan lulusan yang menguasai konsep teoretis di bangku kuliah, namun juga memiliki kapasitas adaptif dan aplikatif di dunia kerja yang sesungguhnya. Program magang atau praktek

kerja lapangan hadir sebagai instrumen strategis guna menyelaraskan gap kompetensi antara dunia akademik dan dunia kerja. Melalui keterlibatan langsung di dalam ekosistem kerja instansi, mahasiswa dapat melatih kemampuan teknis (*hard skills*) sekaligus mengasah aspek non-teknis (*soft skills*) seperti komunikasi profesional, kerja sama tim, kedisiplinan, dan penyelesaian masalah di bawah tekanan birokrasi nyata.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, manajemen administrasi publik memegang peranan yang sangat vital. Manajemen beban administrasi yang efektif menjadi penentu utama kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (Abdullah & Gultom, 2024). Setiap unit kerja di lingkungan pemerintahan dituntut meminimalkan hambatan kepatuhan dan biaya psikologis agar alur pelayanan dan pelaporan dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, ketepatan pengelolaan instrumen keuangan seperti anggaran kas daerah menjadi pilar krusial dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tercipta efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan fiskal daerah (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023). Integrasi antara tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan inilah yang mendasari keberhasilan eksekusi kebijakan pembangunan di tingkat regional.

Kantor Walikota Padang, sebagai episentrum administratif Pemerintah Kota Padang, memiliki unit kerja strategis yaitu Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan di bawah naungan Sekretariat Daerah Kota Padang. Unit ini memiliki fungsi sentral untuk mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengawal sinkronisasi program kerja antar perangkat daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kompleksitas pembangunan daerah menuntut adanya sinergi kebijakan yang kuat agar terhindar dari fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih program kerja (Nathan, 2025). Guna mewujudkan tata pamong yang akuntabel, fungsi pengawasan terhadap pembangunan fisik dan infrastruktur daerah juga menjadi instrumen esensial yang melekat pada biro administrasi pembangunan (Hidayah & Sasmita, 2025). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai bagaimana alur kerja administrasi, rekapitulasi data, serta penyusunan laporan pembangunan dilaksanakan di unit ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus berbasis keterlibatan lapangan langsung (*action-oriented field study*). Kegiatan pengumpulan data dan praktik kerja operasional dilaksanakan di Kantor Walikota Padang, bertempat pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang yang berlokasi di Jl. Bagindo Azis Chan No. 1, Balaikota Padang Aie Pacah, Kota Padang. Waktu pelaksanaan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan 6 Maret 2026.

Data primer dalam kajian ini diperoleh melalui observasi partisipatif, di mana para penulis terlibat aktif secara harian dalam ritme kerja operasional kantor yang didukung oleh 12 orang pegawai tetap, termasuk Kepala Bagian Drs. Erwin M., MA. Interaksi intensif dan diskusi terarah dilakukan bersama pembimbing lapangan, Melya Afrigus, SE (Penata Layanan Operasional), guna memahami alur birokrasi, mekanisme pelaporan keuangan, serta validasi data pembangunan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi daerah khususnya Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 67 Tahun 2022 serta laporan-laporan APBD, berkas pengarsipan, dan literatur ilmiah relevan mengenai administrasi pembangunan daerah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data kegiatan harian, penyajian dalam bentuk deskripsi naratif, serta penarikan kesimpulan logis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 67 Tahun 2022, Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan memiliki tugas utama melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan, pengoordinasian tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaporan, penyusunan program, dan pengendalian program daerah. Struktur organisasi di unit ini dirancang secara sistematis dengan pembagian peran fungsional yang meliputi Sub Bagian Penyusunan Program dan Perencanaan, Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, serta Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sistem administrasi di unit ini telah berjalan dengan sangat terstruktur dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Aktivitas

operasional yang dilakukan selama masa magang dapat diklasifikasikan ke dalam empat pilar kegiatan utama:

1. Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah

Penyusunan laporan berkala merupakan instrumen pengendalian yang krusial. Penulis berkontribusi langsung dalam membantu proses kompilasi berkas yang berkaitan dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan fisik, serta draf laporan evaluasi program triwulanan. Aktivitas ini menuntut pemahaman regulasi yang ketat karena laporan resmi ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan strategis bagi Walikota dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan urgensi transparansi pelaporan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023).

2. Rekapitulasi Data dan Manajemen Informasi

Data yang valid merupakan fondasi utama dari kualitas perencanaan makro. Kegiatan rekapitulasi data mencakup pengolahan data laporan bulanan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelacakan log pengiriman berkas, serta pencatatan pengeluaran logistik kebutuhan kantor. Penulis mengolah data tersebut ke dalam format tabel sistematis untuk menghindari bias informasi. Ketelitian dalam rekapitulasi data sangat esensial karena deviasi data yang kecil dapat berakibat pada kegagalan sinkronisasi program pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten (Kasmin et al., 2022; Pramawati et al., 2024).

3. Administrasi Perkantoran dan Digitalisasi Dokumen

Dalam era transformasi digital, aspek administrasi perkantoran di Kantor Walikota Padang mulai mengadopsi prinsip digitalisasi dokumen melalui aktivitas pemindaian (*scanning*) berkas fisik menjadi arsip digital. Langkah ini mempercepat aksesibilitas data dan memperkuat keamanan dokumen jangka panjang. Di samping itu, tugas rutin seperti pengelolaan disposisi surat masuk/keluar, pengisian formulir formal, dan koordinasi tanda tangan pejabat dilakukan guna menjaga ketertiban sirkulasi birokrasi. Implementasi digitalisasi ini teoretis mendukung efisiensi layanan, meskipun kesiapan kapasitas elemen dukungan dan nilai (*support, capacity,*

value) dalam pengembangan *e-government* harus terus dievaluasi agar berjalan optimal dan tidak memunculkan ketidakefektifan proses akibat lemahnya komitmen pelaksana (Fahik et al., 2024; Oktaviana et al., 2022). Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terbukti menjadi instrumen penting dalam meminimalisir kesalahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Sari, 2022; Sukmawaty et al., 2024).

4. Pembentukan Sikap Kerja Melalui Kegiatan Rutin

Selain tugas teknis, penanaman budaya kerja dilakukan melalui partisipasi dalam apel pagi setiap hari dan kegiatan wirid bersama setiap hari Jumat. Apel pagi berfungsi sebagai medium internalisasi disiplin kerja dan penyampaian arahan operasional instan dari pimpinan. Sementara itu, kegiatan wirid bersama dirancang untuk membangun keselarasan spiritualitas dan mempererat hubungan emosional yang harmonis antar-pegawai, sehingga dapat mereduksi stres kerja birokrasi.

Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut, ditemukan beberapa kendala internal yang dihadapi oleh praktikan, antara lain: (1) keterbatasan pengalaman kerja awal di lingkungan pemerintahan formal; (2) hambatan adaptasi psikologis terhadap ritme dan budaya birokrasi yang kaku; (3) kompleksitas alur administrasi lintas sektoral yang memerlukan ketelitian tinggi; serta (4) risiko kesalahan dalam pengolahan angka-angka data rekapitulasi. Menghadapi kendala tersebut, solusi adaptif yang diterapkan meliputi peningkatan inisiatif belajar proaktif melalui komunikasi dua arah dengan pembimbing lapangan, mempelajari pola dan format dokumen terdahulu (*template-matching*), serta menerapkan metode pengecekan ganda (*double-checking*) pada setiap luaran kerja demi menjamin akuntabilitas data.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan magang di Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang membuktikan bahwa sistem administrasi operasional instansi telah berjalan secara sistematis, transparan, dan terstruktur sesuai amanat Perwako Padang No. 67 Tahun 2022. Aktivitas esensial yang meliputi penyusunan laporan capaian APBD, rekapitulasi data makro, serta digitalisasi arsip perkantoran berkontribusi nyata dalam menjaga kelancaran roda pemerintahan daerah. Kunci

keberhasilan penyesuaian diri mahasiswa di lingkungan birokrasi terletak pada sikap proaktif, integritas kedisiplinan, dan ketelitian kerja. Disarankan bagi instansi untuk terus mengoptimalkan modul pembekalan teknis bagi mahasiswa magang di awal periode, sedangkan bagi perguruan tinggi disarankan untuk memperluas kemitraan strategis dengan instansi pemerintah guna menyiapkan lulusan yang siap bersaing dalam iklim kerja administrasi publik modern

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M., & Gultom, M. T. P. (2024). Analisis Manajemen Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 501-507. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12787951>.
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Urgensi Anggaran Kas dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Efisien pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368-382. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>.
- Fahik, A. K., Akadira, T., & Jumiati, I. E. (2024). Kesiapan Elemen Support, Capacity Dan Value Untuk Pengembangan E-Government Pada Aplikasi "Miton" Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1036-1045. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1994>.
- Hidayah, R. U., & Sasmita, S. (2025). Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Sumatera Barat oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbar. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 566-580.
- Kasmin, M. R. H., Suaib, E., & Amir, M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(2), 194-201.
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573-1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>.
- Oktaviana, R., Yuliani, F., & Adianto. (2022). Efektivitas Pelaksanaan e-Office Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 62-71.
- Pramawati, F., Suaib, E., & Qomariyah, E. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 171-182.

- Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *JMIAP (Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik)*, 4(4), 242-248. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>.
- Sukmawaty, Gunawan, & Yusuf, M. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 98-108.